

MEDIA DAN TERORISME

(*Stereotype Pemberitaan Media Barat dalam Propaganda Anti-Terrorisme oleh Pemerintah Amerika Serikat di Indonesia Tahun 2002*)

Sri Herwindya Baskara Wijaya
(r_windya@yahoo.com)

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrack

All year of 2002 in Indonesia, West media especially media in United States of America (USA) preference not balance to report issues about global terrorism from USA goverment. There are preference from part of media in West World which they see Islam via the news as believing violence and Islam peoples as source of global terroris wheares Islam as rahmatan lil alamin. This issues gives positive and negative effect for muslim in the world especially in Indonesia.

Keywords : *West media, global terrorism, Islam, muslim*

Pendahuluan

Tragedi berdarah 11 September 2001 yang terjadi delapan tahun lalu masih meninggalkan trauma baik bagi Amerika Serikat (AS) maupun negara-negara muslim yang menjadi "kambing hitam" atas luluh-lantaknya *World Trade Center* (WTC) dan Pentagon, simbol kedigdayaan ekonomi dan militer AS. Sebagai mana diketahui, telunjuk mantan Presiden George Walker Bush langsung diarahkan kepada Osama bin Laden dengan Jaringan Al Qaeda-nya sebagai dalang utama peristiwa "September Hitam" ini. Epilognya sudah sama-sama kita ketahui bahwa stigma teroris tidak hanya menempel pada sosok Osama bin Laden dengan Jaringan Al Qaeda-nya melainkan juga meluas ke seluruh negara muslim. Pemerintah Taliban di Afganistan pun ikut terguling dari kekuasaan karena dianggap melindungi Sang Teroris yang paling diburu hidup atau mati oleh Barat itu. Hingga tampuk tertinggi kepemimpinan AS kini telah beralih dari Bush Junior kepada

Presiden Barrack Hussein Obama, sosok Osama Bin Laden dengan Jaringan Al Qaeda-nya tetap menjadi buruan nomor wahid AS dan sekutu-sekutunya.

Hampir semua aksi pengeboman dan terorisme dengan sasaran AS senantiasa dihubungkan dengan keterlibatan anggota jaringan organisasi yang masih dianggap "misterius" hingga kini yakni Al-Qaeda. Apakah benar-benar ada organisasi bernama Al-Qaeda itu? Ada dugaan Al-Qaeda itu sebenarnya hanyalah rekayasa CIA atau setidaknya hanyalah sebutan pers Barat bagi kelompok pengikut Osama Bin Laden sebagaimana Pemerintah Malaysia dan Singapura menyebut kelompok pengajian yang didakwahi Ustad Abu Bakar Ba'asyir dengan nama organisasi Jamaah Islamiyah (JI). Tidak hanya Al-Qaeda, pihak-pihak yang diduga punya keterlibatan dengan jaringan tersebut baik personal maupun kelompok tak luput dari "perburuan" AS dan sekutunya, minimal dicurigai dan diawasi secara ketat dan simultan.

Lepas dari itu semua, yang pasti isu terorisme telah menjadikan citra ajaran Islam dan umat Islam secara keseluruhan termasuk di Indonesia menjadi tersudutkan. Islam dalam kacamata Barat dipersepsikan sebagai ajaran agama yang menghalalkan dan menebarkan terorisme di muka bumi. Padahal Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi alam semesta) yang justru mengharamkan terjadinya tindak terorisme apapun dalihnya. Apalagi terorisme yang mengatasnamakan Islam dan umatnya secara totalitas. Bukan hanya pembajakan ajaran Islam itu sendiri sesuai tafsir hawa nafsunya, melainkan juga merusak dan merobohkan Islam dan bangunannya dari dalam.

Akibat lain yang timbul akibat petaka terorisme khususnya pascatragedi 11 September 2001 adalah muncul dan maraknya Islamophobia (ketertakutan atas Islam) di Barat. Sebagian masyarakat Barat menjadi takut, khawatir hingga antipati terhadap Islam dan umatnya. Tidak hanya lewat lisan dan tulisan, Islamophobia juga mengarah ke relasi disosiatif bersifat destruktif fisik dan nonfisik seperti "teror" mental dan fisik terutama kepada kaum muslimin yang menjadi minoritas di Barat khususnya di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda dan Australia. Tentu saja kondisi ini sangat tidak konstruktif bagi dunia internasional. Tidak hanya bagi Islam dan umatnya, namun juga bagi terciptanya peradaban global yang damai.

Penghembusan isu krusial dan pelik soal terorisme oleh Barat terutama AS dan sekutunya kepada dunia Islam berhasil bergulir secara massif di tataran internasional tidak lepas dari peran media massa yang dimiliki Barat. Dengan kecanggihan teknologi dan banyaknya jaringan mitra yang bekerja,

media-media di Barat berhasil membangun opini publik global seakan-akan dalang terorisme dunia adalah Islam dan ajarannya. Makalah ini mencoba menyoroiti pemberitaan media Amerika Serikat terkait propaganda antiterorisme yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat (AS) dari perspektif kajian komunikasi internasional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut :

- a. Sejauhmana peran media Barat dalam mempropagandakan isu terorisme yang dikampanyekan oleh Pemerintah Amerika Serikat di Indonesia tahun 2002?
- b. Bagaimana konstruksi berita media Barat dalam mempropagandakan isu terorisme yang dikampanyekan oleh Pemerintah Amerika Serikat di Indonesia tahun 2002?
- c. Sejauhmana efek yang ditimbulkan akibat propaganda isu terorisme di Indonesia yang dikampanyekan Pemerintah Amerika Serikat serta pemberitaan soal terorisme oleh media Barat?

Melek Media

Para ahli menyebut budaya dan masyarakat mutakhir sebagai masyarakat yang jenuh dengan media (*media saturated society*). Masyarakat mutakhir adalah masyarakat yang dibombardir dengan begitu banyak dan melimpah informasi berupa gambar, teks, bunyi dan pesan-pesan visual. Masyarakat mutakhir adalah masyarakat yang dibanjiri narkotisasi media bagi

masyarakat. "Narkotisasi" merupakan istilah yang digunakan informasi dan pesan-pesan komersial. Masyarakat yang jenuh media telah menyebabkan narkotisasi media untuk menggambarkan efek negatif atau menyimpang (*disfunction*) dari media massa.

Istilah ini sebenarnya berasal dari Paul F Lazarsfeld dan Robert K Merton (1948; dalam Ibrahim dan Romli, 2007: 147). Dalam esainya, "*Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Function*", mereka menggunakan istilah "*Narcotizing Disfunction*" untuk menyebut konsekuensi sosial dari media massa yang sering diabaikan. Media massa dianggap sangat efektif membuat orang sangat kecanduan karena media massa telah menjadi informasi apapun bukan karena butuh, tapi karena memang itulah yang terus menerus narkotika sosial paling efisien dan paling bisa diterima. Orang sebanyak-banyaknya disuguhkan kepada mereka. Akhirnya, orang-orang menjadi kurang tercerahkan. Atau, dalam kata-kata Lazarsfeld dan Merton, meningkatnya dosis komunikasi massa dengan kurang hati-hati bisa saja mengubah energi manusia menjadi pengetahuan pasif (Ibrahim&Romli, 2007 : 147-148).

Upaya efektif untuk menghadapi efek jangka panjang dari narkotisasi media adalah dengan menggalakkan program "*media literacy*" (pendidikan melek media). Titik berat perhatiannya adalah pemberdayaan khalayak media (pembaca, pendengar dan pemirsa). *Media literacy* adalah kemampuan untuk memilah, mengakses, dan menganalisis isi media sehingga khalayak diharapkan hanya memanfaatkan isi media sesuai dengan kepentingannya. *Media literacy* penting karena faktanya tidak semua isi media massa bermanfaat bagi khalayak.

Banyak di antaranya yang tidak mendidik dan hanya mengedepankan kepentingan pemilik/pengelola media untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Konsep melek media telah dikembangkan sejak pertengahan tahun 70-an. Kemudian tahun 1976 sebuah konferensi yang disponsori *Ford Foundation*, *Markle Foundation*, dan *National Science Foundation* mengusulkan komponen dari kurikulum melek media mencakup beberapa hal. Seperti, kebiasaan-kebiasaan produksi acara TV; analisis daya pikat (*appeal*) TV; karakter dan peran isyarat-isyarat non-verbal; *overview* sejarah dan struktur industri penyiaran; basis ekonomi untuk televisi; analisis format-format tipikal untuk programming hiburan; keprihatinan yang pokok tentang efek *negative programming*; analisis nilai-nilai yang digambarkan dalam isi TV; stan darstandar untuk kritik isi TV; dan pengalaman langsung dengan peralatan TV.

Art Silverblatt dalam bukunya *Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages* (1999), mengidentifikasi paling tidak terdapat lima unsur fundamental dalam pendidikan *media literacy* yakni kesadaran terhadap dampak media, pemahaman memahami dan mengapresiasi isi media. Terhadap proses komunikasi massa, strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan-pesan media, pemahaman terhadap isi media sebagai teks yang menyajikan pandangan bagi kehidupan dan budaya kita dan kesanggupan untuk menikmati, memahami dan mengapresiasi isi media.

Selain itu, ada juga yang menganggap bahwa program *media literacy* sebagai perjuangan untuk meraih kekuasaan (*struggle of power*). Di sini melek media memiliki agenda

jasas untuk melakukan perlawanan terhadap hidden agenda atau agenda terselubung yang ada di balik media. *Media literacy* ini diyakini sebagai jalan menuju ke arah pembebasan masyarakat dari manipulasi pikiran atau propaganda media.

Komunikasi Internasional

Komunikasi internasional merupakan salah satu cabang dari ilmu komunikasi. Maka tak terhindarkan komunikasi internasional pun menggunakan atau meminjam konsep ilmu komunikasi pada umumnya antara lain definisi komunikasi, komponen komunikasi, model-model komunikasi, perspektif komunikasi, faktor manusia dalam komunikasi, faktor media dalam komunikasi dan hambatan dalam komunikasi (Soelhi, 2009 : 1).

Komunikasi Internasional (*International Communication*) adalah komunikasi yang dilakukan dengan kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain. Komunikasi internasional dapat didefinisikan pula sebagai “sebuah orang-orang yang berbeda kebangsaan dan memiliki jangkauan penyampaian pesan melintasi batas-batas komunikasi yang interaksi dan ruang lingkungannya bersifat lintas negara serta berlangsung di antara wilayah suatu negara” (<http://id.shvoong.com>).

Sebagai sebuah bidang kajian, komunikasi internasional memfokuskan perhatian pada keseluruhan proses melalui mana data dan informasi mengalir melalui batas-batas negara. Subjek yang ditelaah bukanlah sekedar arus itu sendiri, melainkan juga struktur arus yang terbentuk, aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, sarana yang digunakan, efek yang ditimbulkan, serta motivasi yang mendasarinya.

Dilihat dari pelakunya, komunikasi internasional dapat dipandang sebagai terbagi antara :

1. *Official Transaction*, yakni kegiatan komunikasi yang dijalankan pemerintah.
2. *Unofficial Transaction* atau disebut juga interaksi transnasional, yakni kegiatan komunikasi yang melibatkan pihak non-pemerintah.

Fokus studi komunikasi internasional pada awalnya adalah studi tentang arus informasi antar negara dan dalam perkembangannya muncul studi tentang propaganda. *Flow Information* menyebabkan mulai berkembangnya fokus studi komunikasi internasional antara lain studi tentang imperialisme media, globalisasi, privatisasi, era informasi.

Komunikasi internasional dapat dipelajari dari tiga perspektif yaitu diplomatik, jurnalistik, dan propagentistik. Perspektif diplomatik lazim dilakukan secara interpersonal atau kelompok kecil (*small group*) lewat jalur diplomatik, komunikasi langsung antara pejabat tinggi negara untuk bekerja sama atau menyelesaikan konflik, memelihara hubungan bilateral atau multilateral, memperkuat posisi tawar, ataupun meningkatkan reputasi. Dilakukan pada konferensi pers, pertemuan politik, atau jamuan makan malam.

Perspektif jurnalistik dilakukan melalui saluran media massa. Karena arus informasi didominasi negara maju, ada penilaian komunikasi internasional. Penguasa arus informasi menjadi gatekeeper yang mengontrol arus komunikasi. Komunikasi internasional dalam perspektif ini didominasi negara maju, juga dijadikan negara maju sebagai alat kontrol terhadap kekuatan sosial yang dikendalikan kekuatan politik dalam percaturan politik

internasional. Penguasa arus informasi menjadi *gatekeeper* yang mengontrol arus komunikasi. Jalur jurnalistik ini juga sering digunakan untuk tujuan propaganda dengan tujuan mengubah kebijakan dan kepentingan suatu negara atau memperlemah posisi negara lawan.

Perspektif propagandistik umumnya dilakukan melalui media massa, ditujukan untuk menanamkan gagasan ke dalam benak tindakan; perolehan atau perluasan dukungan, pertajam atau pengubahan sikap dan cara pandang masyarakat negara lain dan dipacu sedemikian kuat agar mempengaruhi pemikiran, perasaan, serta terhadap suatu gagasan atau peristiwa atau kebijakan luar negeri tertentu. Propaganda merupakan instrumen terampuh untuk memberikan pengaruh. Akibat komunikasi internasional dalam perspektif propaganda ini, masyarakat internasional saat ini hidup dengan *travail détente*, juga "perang suci".

Terorisme

Terorisme biasa dirumuskan secara singkat sebagai "puncak kekerasan", *terorisme is apex of violence*. Kekerasan bisa terjadi tanpa teror tapi tidak ada teror yang tanpa kekerasan. Menciptakan rasa ketakutan dan kecemasan yang mendalam tujuan pelaku teror. Untuk itu pelaku teror biasanya melakukan perang mental, perang urat syaraf sebagai bagian dari strategi propaganda untuk menakut-nakuti atau mengancam yang lain (Ibrahim dan Romli, 2007).

Kent Lyne Oots dalam bukunya *A Political Organization Approach to Transnational Terrorism* (1986; dalam Ibrahim dan Romli, 2007: 142) mengajukan sejumlah definisi mengenai "terorisme" antara lain "sebuah tindakan kriminal yang cenderung

mencari publisitas." Dengan kata lain, setiap penggunaan kekerasan untuk tujuan secara sengaja dan acak terhadap kelompok yang dilindungi merupakan tindakan terorisme. Pelakunya bisa perorangan, kelompok, negara atau agen-agen negara.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam (<http://jhonfreedom.blogspot.com>).

Jika dikaitkan dengan eksistensi media massa di ranah kontemporer ini khususnya terkait propaganda antiterorisme global ala Amerika Serikat, salah satu sarana untuk perang mental (terorisme) itu adalah media. Bagi teroris tampaknya media massa amat penting tidak hanya karena sifat peliputannya yang sensasional tetapi juga lantaran dianggap menafsirkan sebaik-baiknya "videologi" dan "pertunjukan" yang mereka lakukan. Karena itu tidak jarang media menjadi panggung pertunjukan teroris". Media massa dianggap paling cerdas memilih sisi-sisi mana dari aksi teroris yang perlu dan tidak perlu dilaporkan. Sementara teroris yang "kreatif" juga

terus menjebak media untuk menjual sensasi-sensasi di balik teror mereka.

George Gerbner dalam tulisannya *Violence and Terror in and by Media* (1992; dalam Ibrahim dan Romli, 2007: 145) mengkritisi peran

Propaganda Antiterorisme

Terorisme telah menjadi salah satu isu utama di pentas hubungan internasional khususnya sejak Tragedi WTC dan Pentagon 11 September 2001 di Amerika Serikat (AS). Isu mengenai terorisme ini kian santer di pentas global setelah terjadinya rentetan pengeboman di beberapa negara termasuk di Indonesia seperti bom Bali I dan II, bom di Hotel JW Marriot I dan II di Jakarta, bom di Hotel Ritz Carlton dan lainnya. Pemerintah AS dan sekutunya tampak sekali bergairah mempropagandakan antiterorisme. Terutama AS sebagai pihak yang sempat menjadi "korban" keganasan para teroris yang menelan ribuan warganya akibat peledakan di WTC dan Pentagon, 2001 silam. Maka, dikampanyekanlah propaganda secara sistematis oleh Pemerintah AS pascatragedi 11 September 2001 gerakan antiterorisme sehingga menggelinding dahsyat ke seluruh penjuru dunia. Target pertamanya adalah sosok Osama Bin Laden dan organisasinya, Al-Qaeda yang dicitrakan sebagai "Musuh Amerika Nomor 1". Rezim Taliban di Afganistan yang diduga kuat melindungi milyuder asal Arab Saudi ini akhirnya runtuh dan turut menjadi korban kampanye AS itu dan harus rela meninggalkan kekuasaannya di Afganistan.

Tidak hanya sosok Osama dan organisasinya, Al-Qaeda, propaganda antiterorisme ini secara meluas baik langsung maupun tidak langsung juga ditujukan pihak lain terutama dunia Islam. AS dan sekutunya menjadikan

media dalam ikut mempromosikan terorisme. Media justru telah "menjual" terorisme sebagai komoditas berita semata. Pendeknya mereka (media) telah menjual kekerasan dan teror lewat komoditas informasi yang diberitakan. isu terorisme ini sebagai kebijakan luar negerinya untuk memukul setiap kekuatan Islam terutama sebagian gerakan Islam (*harakah Islamiyah*) di dunia dan jaringannya dengan cap "teroris" seperti HAMAS dan Jihad Islam (Palestina), Hizbullah (Lebanon), Jamaah Islamiyah (Mesir) dan lainnya. Di Indonesia juga tidak lepas dari stereotipe tersebut. Beberapa gerakan Islam turut menjadi target bidikan AS soal propaganda antiterorisme ini dengan label "gerakan Islam radikal" seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan lainnya. Tepatnya, setiap kelompok-kelompok Islam yang dianggap memperjuangkan syariat Islam secara formal kenegaraan, menentang pemerintahan sekuler serta kritis terhadap kebijakan-kebijakan Barat terutama AS dilabeli sebagai "Islam Teroris". Jika tidak berupa tindakan (konatif), minimal pelabelan miring tersebut berupa organisasi-organisasi yang mengusung ide-ide radikal-fundamentalis-teroris (kognitif-afektif).

Stigmatisasi terhadap Islam dan umatnya terutama gerakan-gerakan Islam radikal sebagai sponsor utama terorisme global berhasil mulus salah satunya berkat dukungan media massa pro-Barat (AS dan sekutunya) yang menciptakan opini publik melakukan "pembunuhan karakter" (*character assassination*) hingga melakukan teknik propaganda "penjulukan" (*name calling*) bahwa Islam dan umatnya seakan-akan sebagai aktor intelektual yang menghalalkan aksi-aksi terorisme

dalam meraih tujuannya. Sebagian media-media Barat telah berhasil menciptakan "realitas semu" (*pseudo-reality*) tentang isu terorisme.

Beberapa pemberitaan media massa Barat dan jaringannya terkait isu terorisme oleh kalangan Islam di Indonesia tahun 2002 sebagaimana yang dikutip Ibrahim dan Romli (2007: 27-37) diantaranya :

- a. *USA Today* edisi 20 Maret 2002 melaporkan bahwa berdasarkan laporan intelejen AS, sejumlah operasi Al-Qaeda dilakukan di Indonesia. Menurut laporan harian tersebut, Indonesia merupakan sarang paling nyaman dan aman bagi pelarian aktivis Al-Qaeda mengingat Indonesia adalah daerah yang cukup luas dan lemah dari segi pengawasan pemerintah.
- b. *Time Magazine* edisi 15 tertanggal 23 September 2002 dengan judul "*Confessions of an Al-Qaeda Terrorist*" (Pengakuan Seorang Teroris Al-Qaeda) pernah menurunkan tulisan keterkaitan Abu Bakar Ba'asyir (Pengasuh Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo-Solo) dengan jaringan terorisme internasional yang bersumber dari informasi dinas rahasia Amerika Serikat (CIA). Di majalah internasional itu, Ba'asyir disebut-sebut memiliki hubungan dengan Umar al-Faruq yang dituding sebagai pimpinan tertinggi Al-Qaeda di Asia Tenggara. Ba'asyir sebagai simpul dari jaringan penggalangan dana untuk laskar ke Ambon.
- c. *The Washington Post* edisi 11 Januari 2002 memuat artikel dugaan keterkaitan Al-Qaeda, Laskar Jihad dan kelompok Abu Bakar Ba'asyir yang ditulis oleh intelejen Amerika Serikat, Raviv Chandrasekaran. Ia mensinyalir hadirnya jaringan terorisme di Indonesia. Mereka memperoleh indikasi sejak pemboman Kedubes AS di Kenya dan Tanzania, Al Qaeda mulai memfokuskan diri ke Indonesia, negara yang memiliki jumlah muslim terbesar di dunia.
- d. *The New York Times* edisi 11-12 Januari 2002 memberitakan belasan orang Indonesia yang tertangkap di Singapura dan disebut-sebut memiliki kaitan yang erat dengan beberapa kelompok (teroris) di Malaysia dan Singapura.
- e. *The Straight Times* edisi 9 Januari 2002 mengutip Berita Harian Malaysia memberitakan bahwa tiga orang Indonesia menjadi pimpinan "kelompok militan" tersebut (*Jamaah Islamiyah*) adalah Abu Bakar Ba'asyir alias Abdul Samad, Hambali alias Nurjaman Riduan Isamuddin dan Mohamad Iqbal A Rahman alias Abu Jibril. Mereka disebutkan berasal dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).
- f. *The Straight Times* edisi 18 Februari 2002 memberitakan pernyataan Menteri Senior Singapura, Lee Kwan Yew bahwa Singapura masih beresiko menjadi sasaran serangan teroris karena masih berkeliarannya pemimpin-pemimpin sel ekstrem di Indonesia.
- g. *Far Eastern Economic Review* (FEER) edisi 12 Desember 2002 dalam wawancara *What Went Wrong ?* memberitakan pernyataan Menteri Senior Singapura, Lee Kwan Yew

bahwa masa depan Asia Tenggara terancam oleh berkembangnya kelompok-kelompok radikal Islam. Menurutnya di Indonesia ada 100 kelompok radikal Islam yang berbahaya. Di bawah kendali Ba'asyir dan Hambali, mereka berupaya menguasai Indonesia dan bercita-cita mendirikan *Daulah Islamiyah* yang menghimpun Indonesia, Singapura, Malaysia dan Filipina dalam satu kekhalifahan. Kelompok-kelompok radikal Islam ini tumbuh subur di era Pemerintahan Habibie. Bahkan Habibie dianggap menghalalkan penggunaan simbol dan slogan agama dalam wacana perpolitikan di Indonesia.

- h. *Christian Science Monitor* sejak 12 Oktober 2001 terutama pascatragedi 12 Oktober 2002 di Bali terus menerus membuat laporan soal sel-sel Jamaah Islamiyah (JI) dan Al-Qaeda di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Nama-nama Hambali, Ba'asyir, Al-Faruq dan Agus Dwikarna (salah satu WNI aktivis Laskar Jundullah Komite Penegak Syariat Islam (KPSI) Sulawesi Selatan yang ditangkap di Filipina dengan tuduhan terlibat terorisme), sudah lama-lama disebut. Media ini juga gencar mengkritik Pemerintahan Megawati yang dinilai "lemah dalam mengatasi aktivitas jaringan teroris di Indonesia". Mengutip salah satu propagandis AS, Rohan Gunaratna, koran ini mengatakan bahwa sel Al-Qaeda lokal punya kemampuan melakukan aksi teror apapun di Indonesia.

- i. *The Australian* edisi 13 Desember 2002 memberitakan enam pucuk pimpinan JI, termasuk Ba'asyir, menghadiri sebuah pertemuan di Bangkok (*Bangkok Meeting*) pada awal Februari 2002 untuk merencanakan Bom Bali. Namun berita ini langsung dibantah pemerintah Thailand.
- j. Dan lain-lain.

Dari berita-berita yang tersebar di sejumlah media massa terkemuka di Barat terutama di AS, kita bisa melihat dengan jelas gambaran atau paling tidak kesan umum dalam masyarakat internasional betapa Indonesia didominasi oleh "kelompok Islam militan" dan Indonesia dianggap sebagai sarangnya kelompok Islam yang mengarah kepada aksi kekerasan dan terorisme, terutama terhadap AS.

Konstruksi Berita Propaganda Terorisme

Penggambaran secara sepihak dan sadar oleh media Barat seperti pemberitaan terkait isu-isu terorisme dalam studi media kritis dikenal sebagai teknik "demonisasi" yakni usaha penciptaan nama buruk terhadap suatu komunitas secara massif (skala besar) dan sistematis, biasanya melalui propaganda media dengan teknik rekayasa citra ataupun imagologi (Ibrahim dan Romli, 2002 : 65).

Dalam praktik demonisasi, pihak lain digambarkan sebagai iblis atau setan yang harus diwaspadai, dicurigai atau kalau mungkin perlu dibasmi. Karena proses demonisasi itu biasanya dilakukan secara berulang-ulang dan dilatari stereotipe-stereotipe mengenai "orang atau kelompok" lain sebagai musuh, maka lambat lain kesadaran kritis mengenai obyek yang digambarkan itu pun akan hilang. Pada gilirannya karena proses "kolonisasi

kesadaran” yang dilakukan pihak perekayasa citra atau agen-agen demonisasi, maka citra atau gambaran dalam benak kita mengenai obyek, orang atau kelompok tertentu pun akan terdistorsi berdasarkan kepentingan agen-agen demonisasi tersebut.

Sejauh pandangan penulis, sebagian peliputan media Barat seperti Majalah *Time* terkesan tidak profesional karena tidak menerapkan konsep *cover both side* (pemberitaan silang atau liput banyak pihak) demi mencari sebuah kebenaran. Sebagai salah satu contoh, *Magazine* edisi 15 tertanggal 23 September 2002 dengan judul “*Confessions of an Al-Qaeda Terrorist*” (Pengakuan Seorang Teroris Al-Qaeda) pernah menurunkan tulisan keterkaitan Abu Bakar Ba’asyir dengan jaringan terorisme internasional yang bersumber dari informasi dinas rahasia AS (CIA). Informasi itu didapatkan CIA dari pengakuan Umar Al Farouq, pria asal Kuwait yang disebut-sebut pimpinan Al Qaeda Asia Tenggara yang ditangkap AS, 5 Juni 2002 di Bogor. Tanpa mengecek kebenarannya kembali langsung kepada Ba’asyir, *Time* langsung memberitakan bahwa Ba’asyir disebut-sebut memiliki hubungan dengan Umar al-Farouq yang dituding sebagai pimpinan tertinggi Al-Qaeda di Asia Tenggara.

Bahkan disebutkan, Ba’asyir sebagai tokoh di balik rentetan kasus bom Natal 2000, terlibat rencana pembunuhan terhadap Presiden RI Megawati Soekarnoputri, sebagai perencana peledakan bom di Masjid Istiqlal dan simpul dari jaringan penggalangan dana untuk laskar ke Ambon. Tentu saja pemberitaan *Time* ini dibantah keras oleh Ba’asyir. Bahkan Ba’asyir bersumpah di depan para ulama yang menjenguknya di RS PKU Muhammadiyah Solo, 21 Oktober 2002 bahwa dirinya tidak kenal Al-

Farouq dan tidak terlibat teror. “*Wallahi, Demi Allah. Saya bersumpah bahwa saya tidak mengenal Umar Al Farouq, tidak pernah menyuruh berbuat sesuatu dan tidak pernah memberikan biaya kepadanya untuk melakukan sesuatu apa pun juga, tidak merasa membantu, menggerakkan dan atau menghasut serta dalam bentuk apapun bahwa saya tidak pernah menyuruh dan tidak pernah membiayai siapa pun juga untuk melakukan pembunuhan terhadap Presiden Megawati maupun presiden RI lainnya.*”

Mengenai terorisme, Herbert Strentz dalam *News Reporters dan News Sources* (1989; dalam Ibrahim dan Romli, 2007 : 28) menyatakan “terorisme bukanlah fenomena yang mewarnai abad ke-20, tetapi tindakan ini kian menonjol karena liputan media berita.” Tak disangsikan hampir sebagian besar mengenai isu terorisme diperoleh dari media. Media tidak henti-hentinya menguak cerita-cerita yang tujuannya tidak lain untuk memuaskan para pembaca yang haus akan informasi mengenai aktivitas dan jaringan terorisme. Tak ayal kalau godaan sensasi berita untuk memikat khalayak juga sering mewarnai pemberitaan mengenai terorisme. Bahkan bukan tidak mungkin wartawan pun bisa melakukan spekulasi terhadap si tersangka dalam proses pencarian beritanya sehingga menggiring para pembaca untuk membuat hubungan satu peristiwa dengan peristiwa lain.

Menyimak fenomena pemberitaan mengenai terorisme, penulis melihat bahwa media memiliki kultur sendiri. Kultur media ini bisa dilihat baik pada saat pemilihan narasumber, penentuan sudut pandang (*angle*), pembuatan judul utama (*head line*) dan bahasa (*wacana*) yang digunakan dalam berita. Semua ini menunjukkan bahwa media bisa

mempromosikan atau menyingkirkan kelompok tertentu berdasarkan kepentingan modal atau kuasa yang dominan di balik kebijakan redaksionalnya. Dalam studi-studi dan penelitian media mutakhir memang sudah terbukti bahwa ekonomi-politik di balik kebijakan redaksional media sedikit banyak juga ikut mempengaruhi budaya jurnalistik dan budaya media.

Dalam kasus pemberitaan mengenai isu terorisme, media bisa masuk "perangkap" sumber berita tertentu yang punya "*hidden agenda*" (agenda tersembunyi) lebih luas. Dengan sumber berita yang terbatas dan sulit diakses, biasanya media cenderung memanfaatkan sumber berita resmi, baik yang bersumber dari agen-agen resmi pemerintah maupun agen-agen yang sedang menekan atau berkolaborasi (bekerja sama) dengan pemerintah. Media seperti ini biasanya cenderung mengembangkan budaya jurnalisme yang dikenal sebagai jurnalisme *pispot* yaitu media dan para jurnalisnya menerima informasi begitu saja dari sumber berita tanpa mengecek kembali kebenaran dan keabsahannya.

Apalagi ketika kompetisi antarmedia berlangsung keras, tekanan untuk memperoleh berita utama pun terus meningkat dan perjuangan untuk menjadi yang terbaik terus menguat di kalangan insan pers. Dalam kalangan kabut kompetisi itu, tidak jarang etika jurnalistik dipertaruhkan sehingga unsur-unsur sensasional seringkali lebih menonjol daripada substansi pemberitaan. Itulah yang penulis pandang terjadi di sebagian pelaporan mengenai isu terorisme dewasa ini.

Banyak pakar media mengkritik pemberitaan tentang isu terorisme. Pasalnya, sebagian media sendiri telah terbawa arus, tidak hanya oleh permainan skenario teroris melainkan oleh agenda resmi pemerintah yang

beroperasi lewat propaganda intelejen dan kontra-intelejen. Itulah sebabnya ada diantara kritikus media yang mengkritik televisi dan media telah terjebak sebagai *terrorvision* atau *terrorism media*. Misalnya pandangan ini sebagaimana yang dikemukakan Edwind Diamond lewat artikelnya "*The Coverage Itself – Why It Turnen into Terrorvision*" (1985; dalam Ibrahim dan Romli, 2002 :).

Analisis Herman (1986; dalam Ibrahim dan Romli, 2007 : 139) memperkuat asumsi *terrorvision* di atas bahwa sekitar selusin media telah memonopoli kekuatan pembentukan agenda politik di AS. Media di AS biasanya mengikuti agenda-agenda kebijakan luar negeri yang dikembangkan oleh Pemerintah AS dan menyingkirkan pandangan-pandangan yang kritis terhadap kebijakan tersebut.

Kalau perlu mereka ikut mendemonisasikan (membangun citra buruk) "musuh-musuh" pemerintah AS sambil mengidealisasikan (menyanjung-nyanjung) negara-negara klien AS. Sebagai misal, Chomsky berargumen bahwa media secara konsisten memproyeksikan citra-citra negatif mengenai Nikaragua, yang dianggap musuh selama pemerintahan Reagan dan juga Bush sambil mengabaikan atau menyembunyikan kejahatan yang dilakukan oleh negara-negara klien AS seperti El Savador dan Guatemala (Chomsky, 1989; Kellner, 1990, dalam Ibrahim dan Romli, 2002). Maka, "*evil mastermind*", "*terrorist mastermind*", dalam hal ini "musuh simbolik" perlu diciptakan lewat dukungan media supaya "*hidden agenda*" (agenda terselubung) itu bisa dibungkus dengan cantik untuk mencengkeram kepentingan mereka di Indonesia.

Graeme Burton menggarisbawahi kekuatan media didasarkan pada uang, kekuatan hukum

dan kekuatan manajemen. Kekuatan ini kemudian menjadi kekuatan untuk membentuk produk. Produk tersebut kemudian memiliki kekuatan untuk mengkomunikasikan ideologi, nilai dan ide. Ide-ide ini kemudian memiliki kekuatan untuk membentuk pandangan-pandangan audiens (Burton, 2008: 72).

Efek Propaganda Antiterorisme

Pemberitaan media-media Barat yang seolah-olah menempatkan pihak tertentu (Islam dan umatnya) sebagai pemicu timbulnya terorisme di dunia memiliki dampak yang luar biasa bagi peta komunikasi internasional. Setidaknya ada sejumlah dampak/efek yang ditimbulkan dari propaganda antiterorisme secara sepihak oleh Barat (AS dan sekutunya) tersebut baik dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak Positif

Pertama, makin tumbuhnya kesadaran untuk bersikap kritis atas media di berbagai komunitas-komunitas global terutama Dunia Islam khususnya umat Islam di Indonesia atas propaganda antiterorisme yang dilancarkan AS dan sekutunya. Hal ini karena faktanya tidak semua isi media massa bermanfaat bagi khalayak termasuk isi pemberitaan media-media Barat tentang terorisme di Indonesia. Banyak di antaranya yang tidak mendidik dan hanya mengedepankan kepentingan pemilik / pengelola media untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya atau agenda tertentu secara sepihak oleh produsen berita. Sikap melek dan cerdas media di sini berupa kemampuan untuk memilah, mengakses, dan menganalisis isi media sehingga khalayak diharapkan hanya memanfaatkan isi media sesuai dengan kepentingannya. Salah satunya dengan melakukan *counter of media* sebagai perwujudan dari hak jawab khalayak

kepada media yang memberitakan.

Terjadinya *counter of media* dari pihak-pihak yang merasa disudutkan (umat Islam) akibat pemberitaan subyektif oleh media-media Barat terkait terorisme. *Counter of media* dari pihak-pihak yang merasa dirugikan ini sangat penting bagi tumbuh kembangnya jurnalisme profesional, berkualitas dan sehat. Dalam perspektif jurnalistik, mekanisme inilah yang disebut dengan hak jawab yaitu hak memberikan respons atas pemberitaan media yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan pelaku hak jawab. Respons ini berupa pelurusan berita agar ada keseimbangan pemberitaan sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Contoh dari *counter of media* adalah bantahan Pengasuh Ponpes Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Solo, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir bahwa dirinya sama sekali tidak terkait dengan aksi-aksi terorisme seperti yang disangkakan media-media Barat. Seperti bantahan Ba'asyir saat dirinya dirawat di RS PKU Muhammadiyah Solo, 21 Oktober 2002. Ia bersumpah di depan beberapa ulama yang menjenguknya bahwa dirinya tidak kenal Al-Farauq dan tidak terlibat teror, tidak pernah menyuruh berbuat sesuatu dan tidak pernah memberikan biaya kepadanya untuk melakukan sesuatu apa pun juga, tidak merasa membantu, menggerakkan dan atau menghasut serta dalam bentuk apapun bahwa saya tidak pernah menyuruh dan tidak pernah membiayai siapa pun juga untuk melakukan pembunuhan terhadap Presiden Megawati maupun presiden RI lainnya.

Tidak sekadar membantah dan bersumpah, Ba'asyir juga menempuh jalur hukum dalam "perangnya" dengan media khususnya Majalah Time serta CIA. Tanggal 16 Oktober 2002, ia bersama Tim Pengacara Muslim (TPM)

menggugat *Time* Rp 1 triliun melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu ditujukan kepada *Time Inc.*, Karl Taro Greenfield (Editor *Time*) dan Jason Teja Sukmana (wartawan *Time* di Indonesia). Sebelumnya, 25 September 2002, Ba'asyir dan TPM juga menggugat CIA melalui meja hijau (Ibrahim dan Romli, 2002 : 68).

Kedua, tumbuhnya solidaritas sesama umat Islam khususnya terkait propaganda sepihak AS dan sekutunya termasuk kalangan media-media di Barat. Hal itu tampak dari berbagai reaksi yang muncul dari kaum muslimin di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Hal itu tampak dari dukungan berbagai kalangan atas kasus dugaan terorisme yang melibatkan Ustad Abu Bakar Ba'asyir di Tanah Air baik melalui aksi-aksi unjuk rasa hingga penggalangan bantuan hukum (advokasi). Sebagai salah satu contohnya adalah pernyataan sikap para tokoh Islam dan Ormas-Ormas Islam di Indonesia yang dikoordinatori Majelis Ulama Islam (MUI) terkait propaganda antiterorisme oleh AS dan sekutunya. Bertempat di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, 24 September 2005, Ormas-Ormas Islam melalui Sekretaris Umum MUI Pusat, Prof. Dr. Dien Syamsuddin, MA menegaskan tidak ada WNI yang terlibat dalam jaringan terorisme, Ormas-Ormas Islam di Indonesia seperti Laskar Jihad, MMI dan FPI bukan termasuk teroris dan terlibat dalam jaringan teroris dan Islam di Indonesia adalah Islam yang moderat (Ibrahim dan Romli, 2002 : 76-77).

Ketiga, tumbuhnya kesadaran umat Islam di Indonesia untuk ikut aktif mengkampanyekan Islam sebagai agama perdamaian atau rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil alamin*) kepada masyarakat internasional. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan berbagai forum-forum perdamaian

dunia oleh Ormas-Ormas Islam terutama Nahdlatul Ulama (NU) melalui *International Conference Islamic Scholar (ICIS)* dan Muhammadiyah lewat *World Peace Forum (WPF)*. Selain menyelenggarakan forum sendiri, NU dan Muhammadiyah sebagai dua Ormas Islam terbesar di Indonesia itu juga proaktif mengkampanyekan Islam sebagai agama damai dan toleran di berbagai forum-forum internasional lintas agama dan lintas budaya seperti di forum APEC, Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai forum global lain (Shoelhi, 2009 : 225).

Pemerintah Indonesia juga proaktif mengkampanyekan perdamaian dunia sebagai respons atas disharmoni hubungan internasional yang salah satunya dipicu isu terorisme global. Seperti penyelenggaraan *Global Intermedia Dialogue*, 1 September 2006 di Bali dengan tema "*Promoting Freedom of Expression and Tolerance*" yang dihadiri 70 tokoh media terkemuka dari 53 negara di dunia. Selain itu, Pemerintah Indonesia sering tampil ke berbagai forum dunia untuk menjelaskan Indonesia sebagai negara cinta damai dan toleran, bukan negara sarang kaum radikal dan teroris. Pemerintah Indonesia juga aktif mengkampanyekan Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia sebagai agama perdamaian, ramah dan toleran, bukan agama penganjur kekerasan apalagi terorisme (Shoelhi, 2009 : 221).

Efek Negatif

Pertama, terjadinya konflik urat syaraf antara Pemerintah AS dan sekutunya termasuk media-media yang seirama dengan berbagai pihak yang dituduh secara langsung dan sepihak sebagai dalang terorisme dunia terutama umat Islam. Konflik tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang bertikai

secara personal seperti seorang Abu Bakar Ba'asyir dengan Pemerintah AS, melainkan juga meluas ke pihak lain dengan menggunakan sentimen-sentimen keagamaan dan kebangsaan. Pihak-pihak lain yang ikut terseret arus konflik efek propaganda antiterorisme itu baik secara kelembagaan terutama Ormas-Ormas Islam di Indonesia. Secara global, Dunia Islam juga mengancam aksi sepihak AS dan sekutunya terkait terorisme sebagai tindakan yang berlawanan dengan nurani kemanusiaan. Sikap kurang simpati dan bahkan antipati tidak hanya ditujukan kepada Pemerintah AS dan sekutunya melainkan juga kepada media-media turut yang mempropagandakan gerakan global antit-erorisme ala AS itu.

Kedua, terganggunya keharmonisan relasi secara kelembagaan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintahan AS dan sekutunya terutama Australia dan Inggris. Meskipun tidak sampai pada tingkat parah seperti pemutusan hubungan diplomatik, namun sikap saling curiga sempat terjadi terutama pemerintah AS dan sekutunya. Bahkan banyak kalangan mengindikasikan adanya intervensi yang kuat Pemerintah AS kepada Pemerintah RI yang saat itu dipimpin Presiden Megawati Soekarno Putri terkait progaganda antiterorisme global itu.

Ini terlihat saat penangkapan Abu Bakar Ba'asyir oleh Polri. Sejumlah kalangan menyayangkan sikap Polri itu yang hanya dengan bukti adanya pengakuan seorang Umar Al-Faruq. Ketika banyak pihak mengusulkan agar Al-Faruq didatangkan ke Indonesia untuk dikonfrontasikan dengan Ba'asyir, para pejabat keamanan Indonesia yang terkait dengan masalah ini terkesan

enggann menanggapi usulan itu. Rumor yang berkembang kemudian adalah dugaan bahwa penangkapan Ba'asyir adalah "pesanan" AS. Tuduhan bahwa Ba'asyir terlibat aksi-aksi terorisme global akhirnya tidak terbukti. Dakwaan lain pun kemudian disangkakan kepada Ba'asyir terkait status kewarganegaraannya yang dianggap "bermasalah" oleh pemerintah Malaysia. Ini karena Ba'asyir menetap di Negeri Jiran itu saat Orde Baru berkuasa. Dakwaan inilah yang kemudian membawa Ba'asyir ke terali besi.

Ketiga, munculnya stigma negatif (*stereotype*) di dunia internasional terkait propaganda antiterorisme AS itu, bahwa seakan-akan Indonesia adalah lahan subur berseminya kelompok-kelompok Islam radikal serta sarang para teroris. Akibatnya, dunia internasional terutama negara-negara Barat melakukan politik "jaga jarak" dengan pemerintah Indonesia seperti melakukan kebijakan *travel warning* kepada warga negaranya terkait kunjungan ke Indonesia. Kondisi ini tentu saja berdampak negatif bagi citra Indonesia di mata internasional yang akhirnya berimbas pada kepercayaan internasional kepada Indonesia terutama di sektor ekonomi.

Tidak hanya pemerintah Indonesia yang dirugikan, rakyat Indonesia secara keseluruhan juga menanggung akibat negatif dari propaganda antiterorisme global ala AS itu khususnya umat Islam. Hal ini karena umat Islam Indonesia merupakan umat mayoritas di Indonesia sekaligus terbesar di dunia dengan jumlah sekitar 200 juta jiwa. Selain itu, citra muslim Indonesia yang selama ini dikenal menganut Islam moderat juga ikut tercoreng. Nama Islam pun juga ikut tercemar di mata global seolah-olah Islam sebagai ajaran yang menghalalkan

kekerasan atau agama kaum teroris padahal Islam merupakan agama perdamaian, Islam adalah rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil alamin*).

Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Sepanjang tahun 2002 di Indonesia, media Barat terutama media di AS cenderung tidak berimbang dalam memberitakan seputar isu terorisme global. Ada kecenderungan sebagian media di Barat mengidentikkan Islam melalui pemberitaannya sebagai ajaran kekerasan dan umat Islam sebagai dalang terorisme global. Hal ini dibuktikan dengan pemberitaan miring terkait terorisme di beberapa media Barat seperti *USA Today*, *Time Magazine*, *The Washington Post*, *The New York Times*, *The Straight Times* dan lainnya.
- b. Terkait isu terorisme global tahun 2002 di Indonesia, media Barat terutama di AS melakukan konstruksi berita yang dalam studi kritis dikenal sebagai teknik “demonisasi” yaitu usaha penciptaan nama buruk terhadap suatu komunitas yang dilakukan secara massif (skala besar) dan sistematis, biasanya melalui propaganda media dengan teknik rekayasa citra. Dalam praktik “demonisasi”, pihak lain sebagai sesuatu yang harus diwaspadai, diwaspadai atau mungkin kalau perlu dibasmi.
- c. Propaganda miring terkait terorisme global di dunia Islam umumnya dan Indonesia

khususnya disebabkan beberapa faktor seperti pandangan yang salah terhadap ajaran Islam, rasa benci terhadap Islam dan umatnya, kompetisi antarmedia dan ketidakprofesionalan internal kerja media.

- d. Propaganda antiterorisme global di Indonesia tahun 2002 oleh pemerintah AS dan sekutunya termasuk media massa pendukungnya memberikan pengaruh/efek bagi bangsa Indonesia khususnya dan umat Islam pada umumnya. Efek positif seperti Pertama, makin tumbuhnya kesadaran bersikap kritis atas media Barat atas propaganda antiterorisme yang dilancarkan AS; Kedua, tumbuhnya solidaritas sesama umat Islam khususnya terkait propaganda sepihak AS termasuk kalangan media-media di Barat; Ketiga, tumbuhnya kesadaran umat Islam di Indonesia untuk ikut aktif mengkampanyekan Islam sebagai agama perdamaian atau rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil alamin*).
- e. Sementara efek negatif seperti Pertama, terjadinya konflik urat syaraf antara Pemerintah AS dan sekutunya serta media-media yang seirama dengan berbagai pihak yang dituduh secara langsung dan sepihak sebagai dalang terorisme dunia terutama umat Islam; Kedua, terganggunya keharmonisan relasi secara kelembagaan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintahan AS dan negara-negara sekutunya. Ketiga, munculnya stigma negatif (stereotip) di dunia internasional terkait propaganda

antiterorisme AS itu, bahwa seakan-akan Indonesia adalah lahan subur berseminya kelompok-kelompok Islam radikal serta sarang para teroris.

2. Saran

- a. Bangsa Indonesia khususnya umat Islam harus lebih cerdas dalam mengkonsumsi media terutama media Barat. Hal ini karena tidak semua pemberitaan media Barat sesuai dengan fakta di lapangan tapi justru menyudutkan pihak tertentu.
- b. Bangsa Indonesia terutama umat Islam harus lebih meningkatkan kemampuan di bidang media terutama teknologi media agar tidak tergantung mengkonsumsi informasi dari Barat seperti yang selama ini terjadi.
- c. Bangsa Indonesia terutama umat Islam harus lebih mewaspadaai praksis (teori dan aksi) soal terorisme terutama yang berkedok agama. Islam adalah agama damai, rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil alamin*) dan sama sekali tidak mengajarkan kekerasan.
- d. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. Jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional (Kovach & Rosenstiel, 2006: 6).

Daftar Pustaka

Ibrahim, Idi S dan Romli, Asep SM. 2007. *Amerika, Terorisme dan Islamophobia: Fakta dan Imajinasi Jaringan Kaum Radikal*. Bandung: Nuansa.

Mohammad Shoelhi. 2009. *Komunikasi Internasional Perspektif Jurnalistik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Burton, Graeme. 2008. *Yang Tersembunyi di Balik Media Pengantar kepada Kajian Media*. Yogyakarta: Jalasutra.

Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom. 2006. *Sembilan Elemen Jurnalisme Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik*. Jakarta: Yayasan Pantau.

Silverblatt, Art. 1995. *Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages*. London: Praeger.

<http://jhonfreedom.blogspot.com/2009/03/pengertian-terorisme.html>

<http://id.shvoong.com/social-sciences/1877112-pengertian-ruang-lingkup-komunikasi-internasional/>